

PERANCANGAN APLIKASI PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT ACEH

Mulkan fadhli

*¹⁻⁷Prodi Teknologi Informasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia Email
Email Korespondensi : mulkan.fadhli@ar-raniry.ac.id*

Abstract: The introduction of regional autonomy in 1999 has significantly raised the expectations for Good Governance in a region. Regional autonomy is seen as a paradigm shift in how development and governance are carried out at the local level. It grants Regional Governments greater autonomy to independently and responsibly manage local economic resources, with the ultimate goal of improving the welfare of the local community. To ensure the effective implementation of this approach, the Inspectorate of Aceh provides internal guidance and supervision to the Government of Aceh, following the guidelines outlined in the Republic of Indonesia Government Regulation No. 12 of 2017 regarding the supervision and administration of regional governments. To meet the extensive requirements of supervision, a document inspection supervision application has been developed. This initiative aligns with Presidential Instruction No. 3 of 2003, which emphasizes the national policy and strategy for the development of E-Government. The application aims to guarantee the quality, effectiveness, and efficiency of the supervision and guidance processes, adhering to the internal supervision standards outlined in the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Regulation No. 19 of 2009, which provides guidelines for quality control of government agency inspectorate audits. The Information System for Supervision Reports by the Aceh Inspectorate will consist of various features, including supervision planning, the objects of supervision, and supervision reports. Each feature will have assigned access rights based on the specific roles of individuals involved, ensuring the security and appropriate processing of the data.

Keywords: Good Governace, E-Government, Supervision.

Abstrak: Tuntutan Good Governace bagi suatu daerah sangat tinggi sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999. Otonomi daerah juga harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, di mana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan orientasi tersebut maka Inspektorat Aceh melakukan pembinaan dan pengawasan internal pada Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan luas dan banyaknya tahapan pengawasan maka dikembangkan sebuah aplikasi pengawasan dokumen pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pengembangan aplikasi agar menjamin bahwa mutu pembinaan dan pengawasan tersebut telah dilakukan secara berkualitas, efektif dan efisien sesuai dengan standar pengawasan internal yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah. Sistem Informasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Aceh akan terdiri beberapa fitur yaitu Perencanaan pengawasan, Objek Pengawasan, dan laporan pengawasan. Untuk menjamin setiap data yang akan diproses maka hak akses setiap fitur diberikan sesuai dengan peran masing-masing. Dengan penelitian ini dapat memberikan gambaran pengembangan aplikasi yang memenuhi berbagai aspek dari Permenpan No 19 Tahun 2009.

Kata kunci: Good Governace, E-Government, Pengawasan.

1. Pendahuluan

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah pada tahun 1999, tuntutan good governance bagi Pemerintah Daerah sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan peranan Pemerintah Daerah sangat strategis dalam menentukan keberhasilan daerahnya. Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu faktor keberhasilan menuju good governance (Syairozi, 2021).

Otonomi daerah juga harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, di mana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggungjawab, yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Ridwan et al., n.d.).

Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah pusat) menjadi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat) (Katalogis, n.d.). Perubahan ini menuntut perlunya mekanisme akuntabilitas manajemen Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Akuntabilitas pada dasarnya mencakup pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai berdasarkan kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomi daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Banyak hal yang dapat diupayakan oleh Pemerintah dalam rangka mencapai akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government adalah merupakan salah satu jawaban mengenai hal tersebut. Telah disadari oleh banyak pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat bahwa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume besar secara tepat dan akurat (Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, 2003).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan atau dikenal dengan istilah E-Government akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja serta perubahan etos kerja di

lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi (Majid, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas utama yaitu:

- Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik.
- Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Salah satu kegiatan dalam pemerintahan khususnya Inspektorat Aceh adalah melakukan pembinaan dan pengawasan internal pada Pemerintah Aceh dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk menjamin bahwa mutu pembinaan dan pengawasan tersebut telah dilakukan secara berkualitas, efektif dan efisien sesuai dengan standar pengawasan internal maka diperlukan pengendalian mutu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (Furqani et al., n.d.).

2. Kajian Kepustakaan Metode Perancangan

Metode perancangan pada sistem informasi manajemen barang daerah menggunakan Extreme Programming (XP). XP merupakan salah satu metodologi dalam rekayasa perangkat lunak dan juga merupakan satu dari beberapa agile software development methodologies yang berfokus pada coding sebagai aktivitas utama di semua tahap pada siklus pengembangan perangkat lunak (software development lifecycle). Metodologi ini mengedepankan proses pengembangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan customer ("agile") dibandingkan dengan metode-metode tradisional sambil membangun suatu perangkat lunak dengan kualitas yang lebih baik.

Extreme Programming muncul menawarkan sebuah disiplin baru dalam pengembangan software secara agile. Tujuan utama XP adalah menurunkan biaya dari adanya perubahan software. Dalam metodologi pengembangan sistem tradisional, kebutuhan sistem ditentukan pada tahap awal pengembangan proyek dan bersifat tetap. Hal ini berarti biaya terhadap adanya perubahan kebutuhan yang terjadi pada tahap selanjutnya akan menjadi mahal. XP diarahkan untuk menurunkan biaya dari adanya perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai basis dasar, prinsip dan praktis (Maurer & Martel, 2002). Dengan menerapkan XP, pengembangan suatu sistem haruslah lebih fleksibel terhadap perubahan. Nilai dasar yang terkandung di dalam Extreme

Programming yaitu : a. Communication (Komunikasi), b. Simplicity (Kesederhanaan), c. Feedback (Masukan), d. Courage (Keberanian), e. Respect (Menghormati).

Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak dapat didefinisikan sebagai:

- Proses untuk mendefinisikan suatu model atau rancangan perangkat lunak dengan menggunakan teknik dan prinsip tertentu sedemikian hingga model atau rancangan tersebut dapat diwujudkan menjadi perangkat lunak.
- Proses mendefinisikan arsitektur perangkat lunak, komponen, modul, antarmuka, pendekatan pengujian, serta data untuk memenuhi kebutuhan yang sudah ditentukan sebelumnya.
- Proses bertahap di mana semua kebutuhan yang ada diterjemahkan menjadi suatu cetak biru yang akan digunakan untuk mengonstruksi perangkat lunak.

Perancangan perangkat lunak merupakan model dan proses. Proses perancangan merupakan serangkaian langkah yang memungkinkan seorang desainer menggambarkan semua aspek perangkat lunak yang dibangun, sedangkan model perancangan hampir sama dengan rencana arsitek untuk sebuah rumah yaitu memulai dengan menyajikan totalitas hal yang akan dibangun (misal pandangan 3 dimensi dari rumah yang akan dibangun, setelah itu akan disaring hal-hal yang memberikan panduan bagi pembangunan setiap detail dari rumah, seperti layout ruangan, layout pipa dan lainnya). Sama halnya dengan model perancangan yang dibuat untuk perangkat lunak memberikan berbagai pandangan yang berbeda terhadap program komputer.

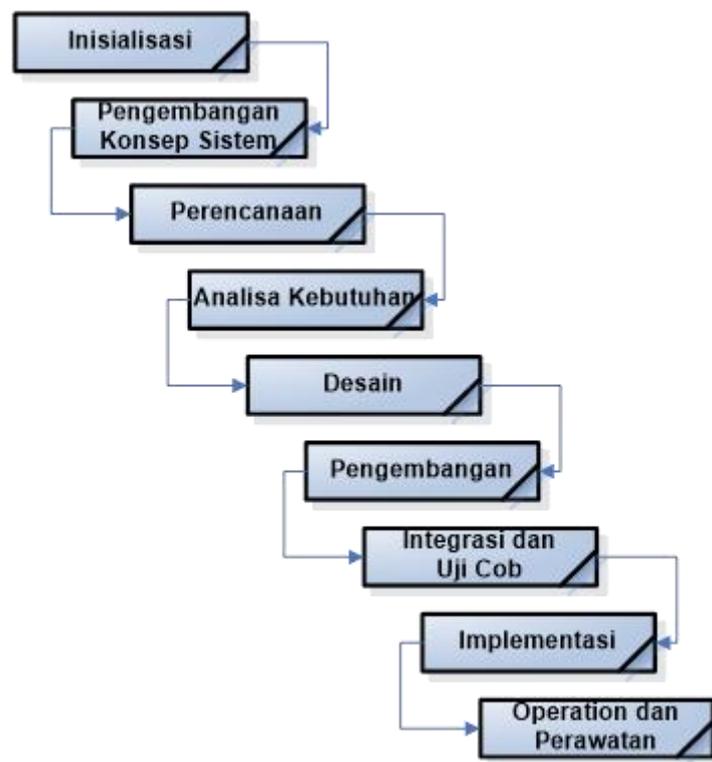
Metode Pengembangan

Saat ini metode pengembangan yang banyak digunakan di berbagai badan pemerintahan di Indonesia masih mengikuti pola konvensional SDLC (System Development Life Cycle), yang terlihat pada Gambar 1. model ini sering juga disebut model waterfall. Kelemahan dari model SDLC ini adalah pengembang aplikasi harus melakukan proses tebak-menebak di dalam pengembangan sistem. Sehingga sering kali aplikasi yang dikembangkan menjadi tidak cocok karena tidak melibatkan pengguna dari sistem.

Di tambah lagi sering kali rekrutmen yang dituliskan pada dokumen tidak menggambarkan apa yang dibutuhkan sistem ataupun pengguna. Sehingga sistem dikembangkan tidak memenuhi kebutuhan. Pada model

SDLC kesalahan spesifikasi sering kali dideteksi pada saat akhir pekerjaan, dan semua sudah terlambat tidak bisa dilakukan perbaikan.

Pada saat pengerjaan aplikasi ini, pihak pengembang akan mencoba menggunakan metode participatory yang melibatkan pengembang dengan pihak pengguna. Pada model ini pengembang dan pihak pengguna secara intens dari awal sudah melakukan interaksi untuk mendefinisikan kebutuhan, menguji prototipe, dan menguji hasil akhir dari sistem. Sehingga tingkat komunikasi antar pengembang dan pengguna atau stakeholder menjadi lebih tinggi dan kesalahan dapat dihindari (Yusril et al., 2021). Model seperti ini yang kini dikenal dalam kelompok Metode Agile.

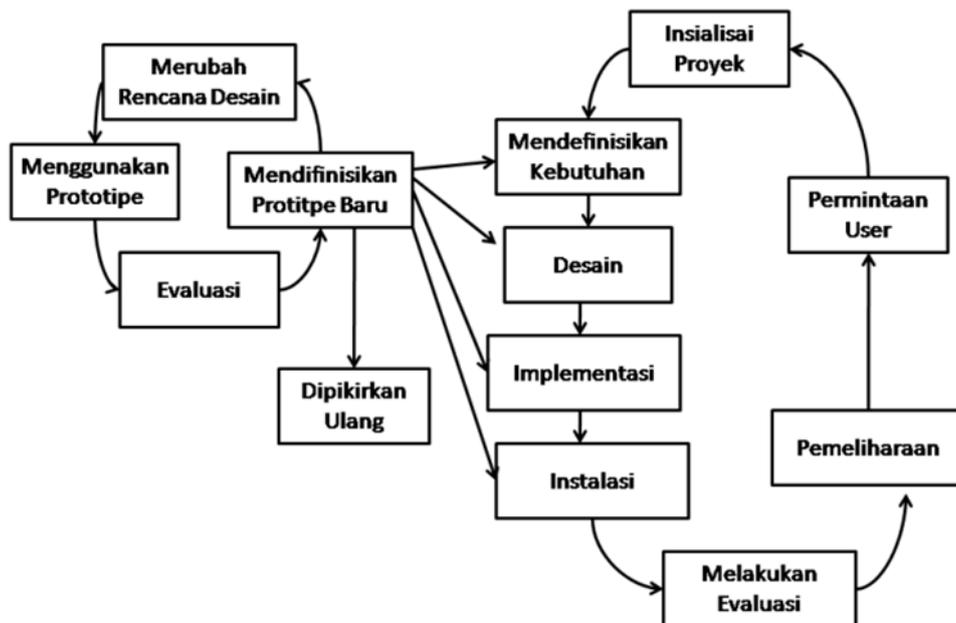


Gambar 1. SDLC

Oleh karena keterbatasan model SDLC itulah, maka ditetapkan untuk sistem yang lebih menghimpun keterlibatan pengguna yang lazim dikenal dalam golongan metode pengembangan yang bersifat “Participatory Development Model”. Salah satu yang tergolong model ini adalah model yang disebut Prototyping Development Model. Model ini tampak seperti pada Gambar 2, metode seperti inilah yang lebih cocok diterapkan di Inspektorat Aceh. Terutama untuk aplikasi yang melibatkan pengguna luas hingga beberapa level user.

Dengan bantuan model pengembangan berbasis prototyping ini, pengembang dan klien dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Sering terjadi klien hanya mendefinisikan secara umum apa yang dikehendakinya tanpa menyebutkan secara rinci keluaran yang dibutuhkan, pemrosesan dan data-data apa saja yang dibutuhkan.

Sebaliknya di sisi pengembang kurang memperhatikan efisiensi algoritma, kemampuan sistem operasi dan antar muka yang menghubungkan manusia dan komputer. Untuk mengatasi komunikasi yang salah antara klien dan pengembang, maka harus dibutuhkan kerjasamanya yang baik di antara keduanya sehingga pengembang akan mengetahui dengan benar apa yang diinginkan klien dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis dan klien akan mengetahui proses-proses dalam menyelesaikan sistem yang diinginkan. Dengan demikian akan menghasilkan sistem sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang telah ditentukan.



Gambar 2. Metode Prototipe

Keunggulan metode yang menggunakan prototyping adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan klien,
- b. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan klien,
- c. Klien berperan aktif dalam pengembangan sistem,
- d. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem,
- e. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya.

Kunci agar model prototype ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu klien dan pengembang harus setuju bahwa prototype dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Prototype

akan dihilangkan sebagian atau seluruhnya dan sistem informasi aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi yang sudah ditentukan (Siswidiyanto et al., 2020). Tahapan-tahapan dalam Prototyping adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan kebutuhan. Klien dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh sistem informasi, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat.
2. Membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada klien (misalnya dengan membuat input dan format output).
3. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh klien apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan klien. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak prototyping direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2, dan 3.
4. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai
5. Menguji sistem. Setelah sistem telah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan White Box, Black Box, Basis Path, pengujian arsitektur dan lain-lain.
6. Evaluasi sistem. Klien mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan; jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5.
7. Menggunakan sistem. Sistem informasi yang telah diuji dan diterima klien siap untuk digunakan.

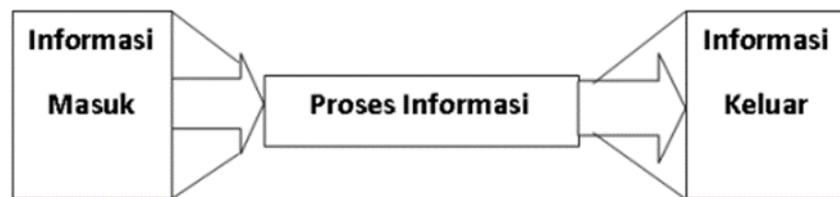
Di dalam pengembangan aplikasi, participatory development model atau yang dikenal dengan kerjasama merupakan bantuan pengembangan sistem dengan melibatkan seluruh stakeholder di dalam proses untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat berdasarkan atas kebutuhan dan kegunaan yang diinginkan. Di dalam participatory, partisipan kerja sama dengan perancang, peneliti, dan pengembang selama kurun waktu proses pengembangan berlangsung. Secara singkat, mereka berpartisipasi dalam beberapa tahapan proses yaitu :

1. Partisipasi dalam tahapan awal eksplorasi dan pendefinisian permasalahan yang ada. Ini berfungsi untuk menjabarkan masalah dan fokus terhadap pencarian solusinya.
2. Partisipasi dalam tengah-tengah tahapan pengembangan hingga akhir. Ini berfungsi untuk mengevaluasi solusi yang diajukan
3. Partisipasi dalam pengoperasian, sehingga memberikan feedback, permasalahan yang dihadapi dalam pengoperasian secara langsung ke pengembang.

3. Metode Penelitian

Arsitektur Informasi

Arsitektur informasi (sering disingkat IA, information architecture) adalah seni menggambarkan suatu model atau konsep informasi yang digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang membutuhkan detail eksplisit dari suatu sistem kompleks (Supriyanto, 2007). Contoh aktivitas tersebut adalah sistem pustaka pemrograman, sistem manajemen isi, pengembangan web, interaksi pengguna, pengembangan basis data, pemrograman, penulisan teknis, arsitektur perusahaan, dan desain perangkat lunak sistem kritis.



Gambar 3. Arsitektur Informasi

Pada aplikasi yang dikembangkan diperoleh beberapa informasi yang masuk yaitu :

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Objek pengawasan
3. Rencana Pengawasan
4. Tim Audit
5. Program kerja pengawasan
6. Hasil pelaksanaan program kerja
7. Kesimpulan
8. Referen PK
9. Permasalahan Objek Pengawasan
10. Penyelesaian masalah objek pengawasan
11. Detail permasalahan objek pengawasan (Kondisi, Kriteria, Sebab, Akibat, Rekomendasi)
12. Tanggapan Objek Pengawasan
13. Konsep laporan hasil pengawasan

Dari informasi yang masuk tersebut, dilakukan proses informasi antara lain :

1. Berdasarkan program kerja pengawasan tahunan yang telah diisi oleh inspektur dan inspektur pembantu, terpilih objek pengawasan dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan objek pengawasan yang telah diprogramkan, inspektur menunjuk tim audit dan menentukan rencana pengawasan sehingga terbit kartu penugasan.
3. Tim audit yang terdiri dari : pembantu penanggung jawab (PPJ), pengendali teknis, ketua tim dan anggota menyusun program kerja

pengawasan dan menunjuk anggota tim yang melakukan audit pada setiap program.

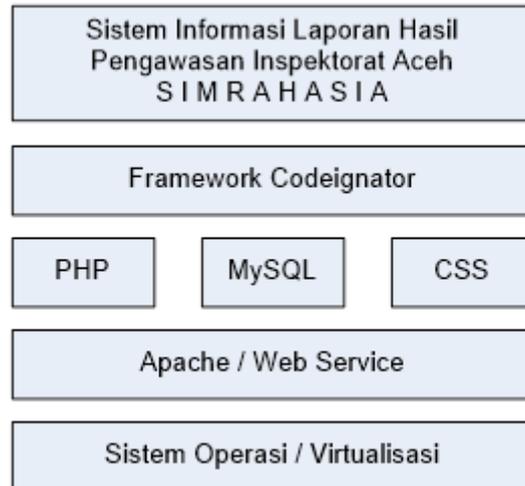
4. Anggota tim yang telah ditunjuk, bekerja berdasarkan program kerja pengawasan sehingga menghasilkan hasil pelaksanaan program kerja, kesimpulan beserta nomor referen Program Kerja yang dimuat pada Kertas Kerja Pengawasan.
5. Ketua tim menyusun temuan pada objek pengawasan berdasarkan kertas kerja pendukung yang telah disusun oleh anggota tim.
6. Inspektur yang dibantu oleh pengendali teknis menerbitkan notisi hasil pengawasan berdasarkan temuan pada objek pengawasan yang telah direviu oleh ketua tim.
7. Objek pengawasan akan memberikan tanggapan terhadap hasil temuan tersebut
8. Dari tanggapan yang diberikan dari objek pengawasan tim audit akan menyusun konsep laporan hasil pengawasan

Berdasarkan proses yang dilakukan diatas, selanjutnya sistem akan menghasilkan informasi keluar sebagai berikut:

1. Kartu Penugasan
2. Kartu Program Kerja Pengawasan
3. Kartu Kertas Kerja Pengawasan
4. Kartu Reviu Supervisi
5. Notisi Hasil Pengawasan
6. Konsep Laporan Hasil Pengawasan
7. Kartu Reviu Konsep Laporan

Arsitektur Perangkat Lunak

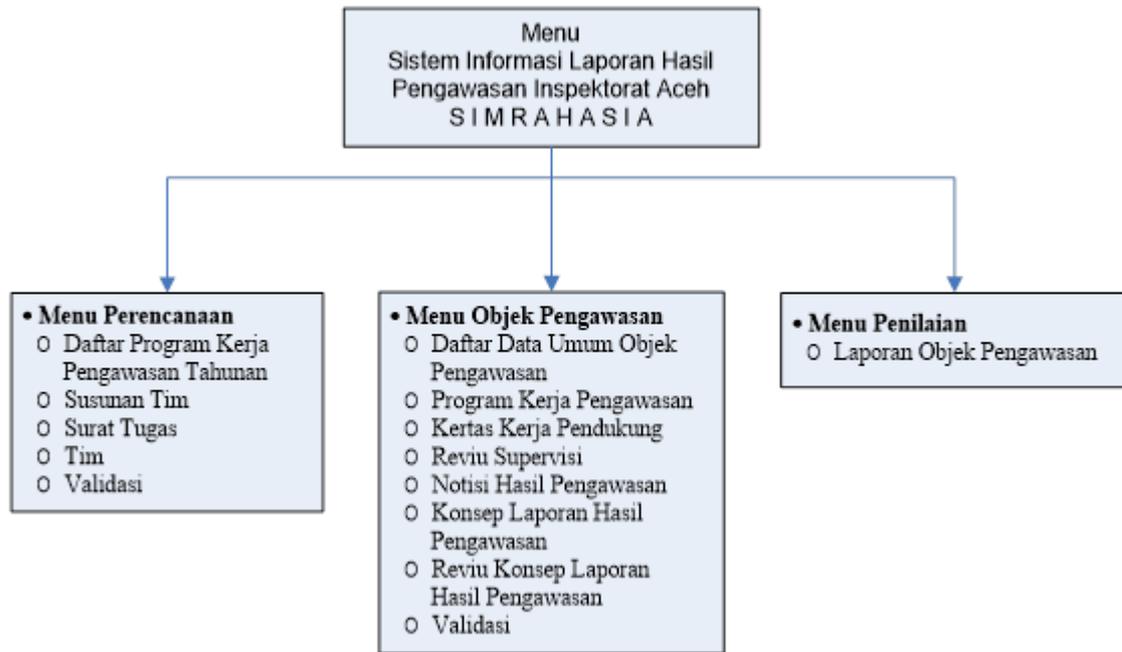
Gambar di bawah merupakan sebuah desain sistem minimalis atau relatif standar. Suatu aplikasi website yang memenuhi aturan pemerintah. Melalui arsitektur ini diharapkan sistem yang terbentuk dapat menjamin keamanan data serta performance data menjadi lebih baik disamping itu mendukung fungsi auditing sistem yang modern sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih baik.



Gambar 3. Arsitektur aplikasi berbasis web

Sistem Informasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Aceh akan terdiri dari beberapa menu utama sebagai berikut :

- Menu Perencanaan
 - Daftar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
 - Susunan Tim
 - Surat Tugas
 - Tim
 - Validasi
- Menu Objek Pengawasan
 - Daftar Data Umum Objek Pengawasan
 - Program Kerja Pengawasan
 - Kertas Kerja Pengawasan
 - Reviu Supervisi
 - Notisi Hasil Pengawasan
 - Konsep Laporan Hasil Pengawasan
 - Reviu Konsep Laporan Hasil Pengawasan
 - Validasi
- Menu Penilaian
 - Laporan Objek Pengawasan



Gambar 4. Tree Menu Aplikasi

Pada Sistem Informasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Aceh terdapat pembatasan hak akses kepada semua auditor, hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dalam proses validasi setiap pekerjaan. Adapun hak akses untuk masing-masing pengguna dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hak Akses

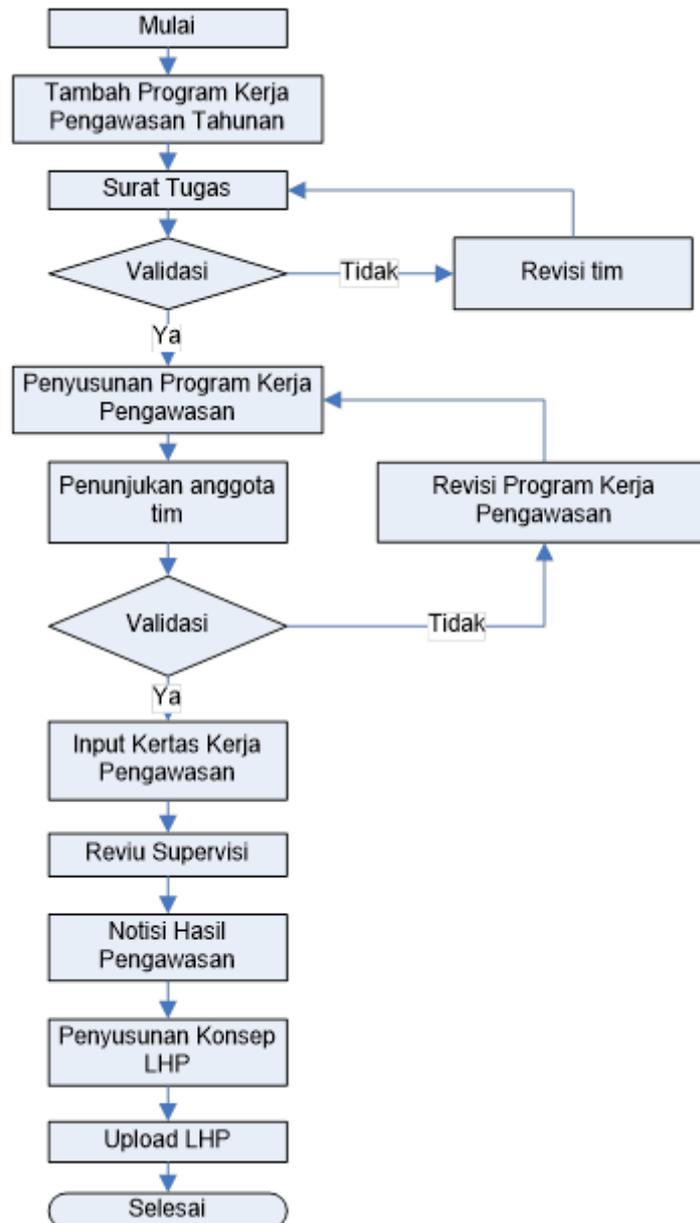
Menu	Hak Akses					
	Inspek tur	Irban	Pengendali Teknis	Ketua Tim	Anggota	Adminis trator
• Menu Perencanaan						
○ Daftar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	x	x				x
○ Susunan Tim	x	x	X			x
○ Surat Tugas	x	x	X			x
○ Tim	x	x	x	x		x
○ Validasi	x	x	x	x		
• Menu Objek Pengawasan						
○ Daftar Data Umum Objek Pengawasan	x	x	x	x		
○ Program Kerja Pengawasan	x	x	x	x		
○ Kertas Kerja Pengawasan	x	x	x	x	x	
○ Reviu Supervisi	x	x	x	X		
○ Notisi Hasil Pengawasan	x	x	x	x		

○ Konsep Laporan Hasil Pengawasan	x	x	x	x	X	
○ Reviu Konsep Laporan Hasil Pengawasan	x	x	x	x		
○ Validasi	x	x	x			
• Menu Laporan						
○ Laporan Objek Pengawasan	x	x	x	x		
○ Validasi	x	x	x			

Dari informasi yang telah dihimpun di atas selanjutnya disusunlah tampilan antar muka yang disepakati pada tahap awal perancangan aplikasi.

Bisnis Proses

Sistem informasi laporan hasil pengawasan Inspektorat Aceh dikembangkan berdasarkan *flowchart* pada **Error! Reference source not found.** yang selanjutnya akan dijelaskan lebih detail dalam bentuk SOP.



Gambar 5. Flowchart SIMRAHASIA

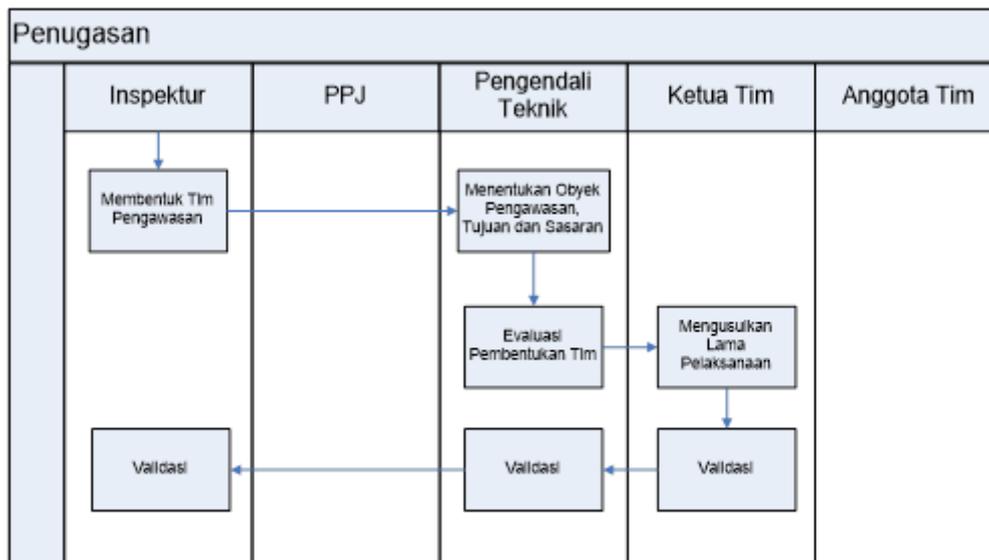
4. Analisis dan Hasil

Proses Bisnis Penugasan

Merupakan kegiatan penetapan jenis penugasan pengawasan, tujuan, sasaran/ruang lingkup dan alokasi sumber daya. Untuk mengendalikan mutu penyusunan rencana dan program kerja penugasan pengawasan. Dengan tahapan kegiatan, yaitu :

1. Pengendali Mutu (Inspektur) menetapkan Obyek Pengawasan, Tujuan, Sasaran, berdasarkan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan)

2. Pengendali Mutu (Inspektur) menunjuk Tim yang akan melaksanakan penugasan pengawasan
3. Tim tersebut terdiri dari Pembantu Penanggung Jawab (PPJ), Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim.
4. Tim mengusulkan lama (waktu) pelaksanaan pengawasan berdasarkan anggaran waktu yang tersedia pada PKPT dan rincian rencana kegiatan yang akan dilakukan.
5. Anggaran biaya yang dibutuhkan sesuai rencana waktu dan personel Tim dengan berpedoman pada anggaran yang tersedia pada PKPT.



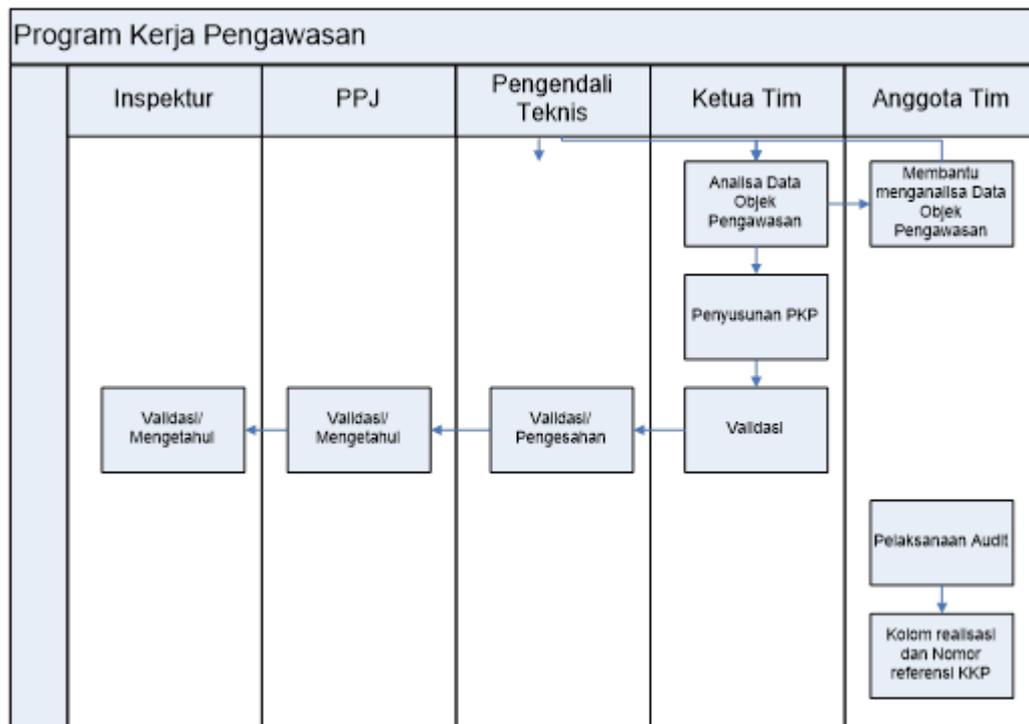
Gambar 6. Diagram Aktivitas Kartu Tugas

Proses Bisnis Program Kerja Pengawasan

Program Kerja Pengawasan (PKP) pada tingkat Tim Pengawasan yang memenuhi kriteria dan memadai. Memiliki tujuan untuk memberikan panduan bagi auditor/pengawas dalam pengendalian mutu kegiatan program kerja penugasan pengawasan. Adapun tahapan kegiatannya, yaitu :

1. Ketua Tim dibantu anggota tim melakukan analisis atas data obyek pengawasan. Analisis juga dilakukan terhadap pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kemungkinan kecurangan yang dilakukan.
2. Berdasarkan hasil analisis Ketua Tim dan Anggota Tim menyusun Program Kerja Pengawasan (PKP) yang menjabarkan secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pelaksanaan penugasan
3. PKP disahkan oleh Pengendali Teknis dan diketahui oleh PPJ dan Pengendali Mutu /Inspektur

4. Kolom realisasi dan Nomor referensi KKP diisi setelah pengawasan dikerjakan secara bertahap



Gambar 7. Diagram Aktivitas PKP

Proses Bisnis Kertas Kerja Pendukung

KKP merupakan bukti dan catatan lainnya yang akan mendukung temuan dan kesimpulan auditor atau pengawas dari pengawasan yang dilaksanakannya dan ditelaah secara berjenjang. KKP memiliki tujuan sebagai pengendalian terhadap dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur pengawasan yang telah dibuat dalam PKP dan bermanfaat bagi suatu kesimpulan hasil pengawasan. Dengan tahapan kegiatannya, yaitu :

1. Langkah kerja/prosedur/metode yang tertuang Program Kerja Pengawasan (PKP) yang telah disetujui oleh Pengendali Teknis dikerjakan oleh anggota tim sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Catatan, hasil analisis, bukti, dan kesimpulan pengawasan yang diperoleh pada waktu pelaksanaan pengawasan didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP).
3. Penyajian KKP sesuai dengan tujuan, rincian yang singkat dan jelas, cermat dan teliti dan dibuat indeks yang saling berhubungan dengan PKP.
4. KKP ditelaah secara berjenjang untuk mendukung temuan pengawasan dan kesimpulannya.



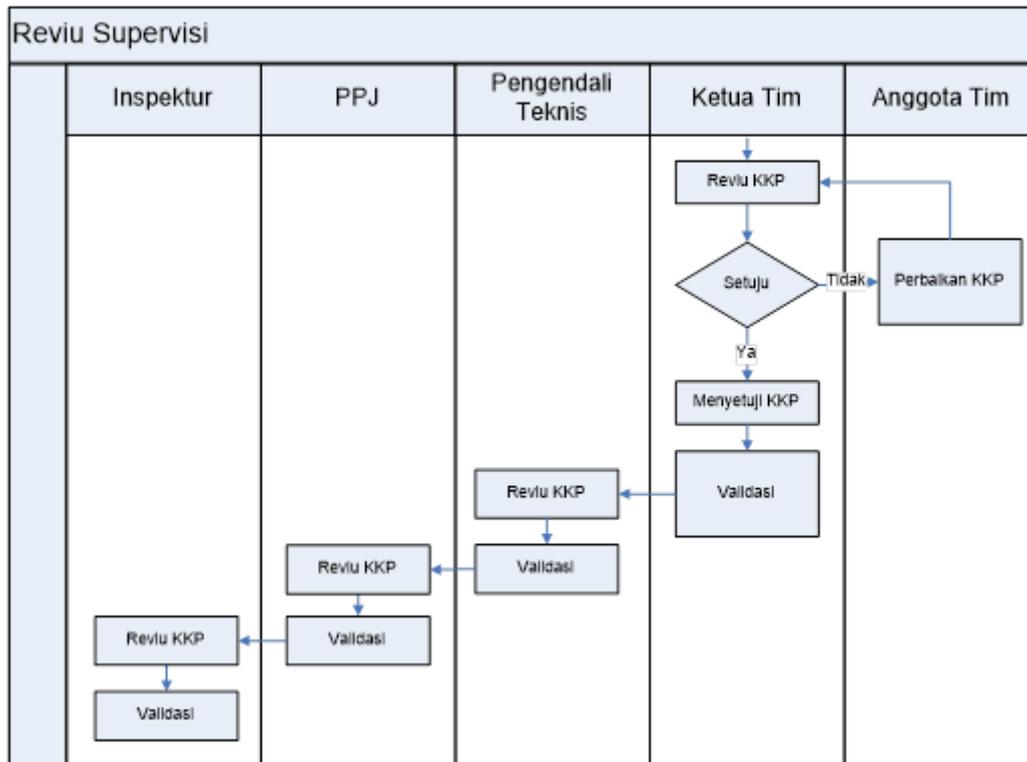
Gambar 8. Diagram Aktivitas Kertas Kerja

Proses Bisnis Reviu Supervisi

Supervisi dilakukan secara berjenjang terhadap semua tim pengawasan sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Dengan tujuan kegiatan agar pelaksanaan pengawasan memperoleh supervisi yang cukup dan memadai sehingga tercapai suatu pengawasan yang bermutu tinggi. Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Ketua Tim mengawasi pelaksanaan tugas Anggota Tim selama pelaksanaan pengawasan, secara langsung maupun melalui reviu KKP yang dibuat Anggota Tim. Divalidasi tanda telah mendapat reviu dan disetujui pada KKP.
2. Pengendali Teknis melakukan reviu atas KKP yang dibuat Ketua Tim. Hasil reviu didokumentasikan pada lembaran reviu Supervisi Pengendali Teknis.

Demikian juga dengan Pengendali Mutu/PPJ melakukan supervisi terhadap Pengendali Teknis dan dicatat pada lembaran reviu supervisi. Formulirnya sama dengan formulir reviu pengendalli teknis

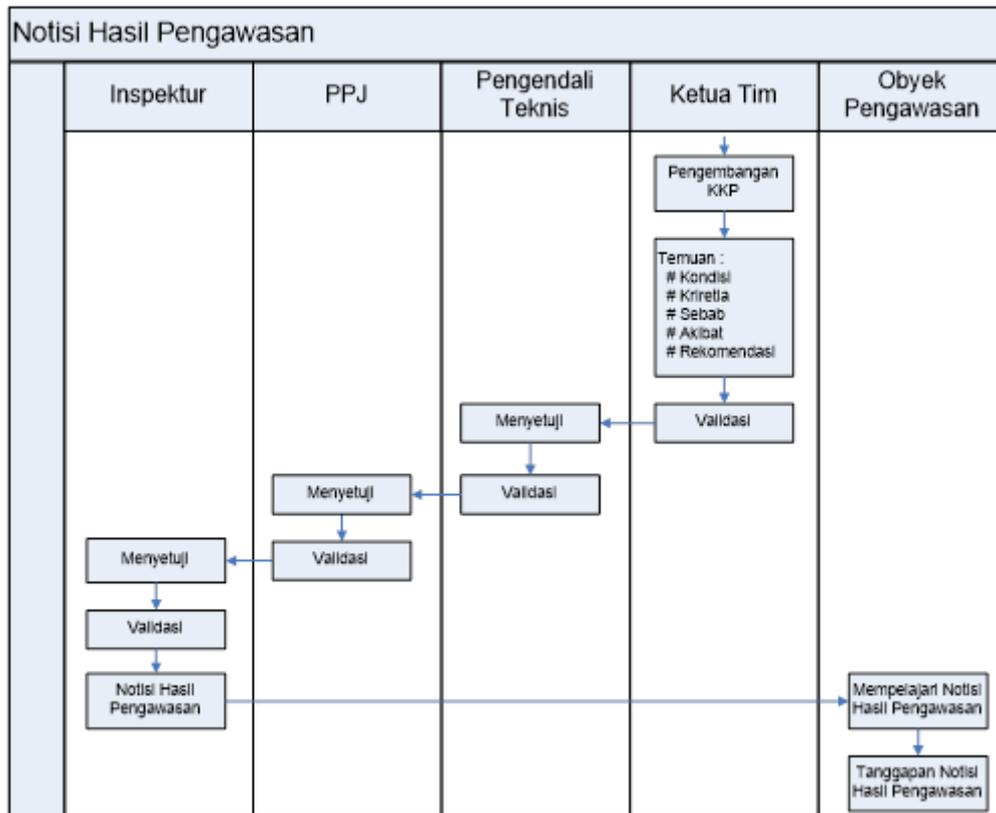


Gambar 9. Diagram Reviu Supervisi

Poses Bisnis Notasi Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan. Hasil pengawasan ini berupa temuan dan rekomendasi yang telah dibahas dan mendapat persetujuan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu/PPJ serta telah dikomunikasikan dengan pihak Obyek Pengawasan melalui media Notisi Hasil Pengawasan. Adapun tujuan kegiatan agar temuan hasil pengawasan yang telah dikembangkan dan rekomendasi yang diberikan telah dibahas dan mendapat persetujuan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu/PPJ serta telah dikomunikasikan dengan pihak Obyek Pengawasan. Dengan tahapan kegiatan, yaitu:

1. Setiap hasil pengawasan dan kesimpulan yang telah didokumentasikan dalam KKP dikembangkan oleh Ketua Tim bersama Anggota Tim dalam unsur-unsur temuan yang terdiri dari: Kondisi ; Kriteria; Sebab; Akibat dan Rekomendasi.
2. Unsur-unsur temuan dan rekomendasi diisi dalam Notisi Hasil Pengawasan disampaikan pada Penanggung jawab Obyek Pengawasan untuk memperoleh tanggapan tertulis.

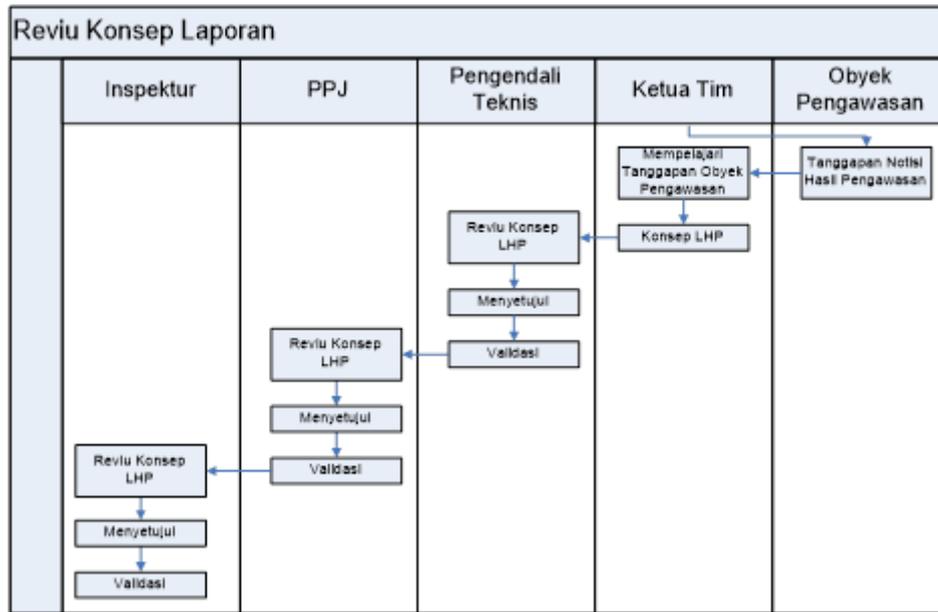


Gambar 10. Diagam Aktivitas Notisi

Proses Bisnis Reviu Konsep Laporan Hasil Pengawasan

Agar dapat menghasilkan mutu laporan hasil pengawasan yang memenuhi standar pengawasan maka dilakukanlah reviu konsep laporan hasil pengawasan. Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Hasil pengawasan yang telah dikonfirmasi dengan obyek pengawasan dituangkan dalam Konsep Laporan Hasil Pengawasan oleh Ketua Tim dibantu anggota Tim.
2. Pengendalian atas penyusunan konsep laporan melalui reviu dilaksanakan secara berjenjang oleh:
 - a. Pengendali Teknis
 - b. Pembantu Penanggung Jawab (PPJ)
 - c. Pengendali Mutu/Inspektur selaku penanggungjawab Tim
3. Permasalahan dan pertanyaan yang muncul pada pelaksanaan reviu ditulis pada formulir reviu konsep laporan.
4. Apabila tidak ada permasalahan lagi maka konsep Laporan Hasil Pengawasan dapat difinalisasi.



Gambar 11. Diagram Aktivitas LHP

6. Kesimpulan dan Saran

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengembangkan model pengembangan aplikasi sistem yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Rujukan kami adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah.

Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi tantangan dan kekurangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada, termasuk proses manual, lambatnya respons, dan kesulitan dalam mengakses informasi terkini. Oleh karena itu, kami merancang dan menerapkan model pengembangan aplikasi sistem yang dapat memperbaiki masalah tersebut.

Penerapan model ini berfokus pada kerangka kerja yang terstruktur dan terukur, dengan penekanan pada integrasi dan otomatisasi proses kerja. Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dengan mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan yang jelas untuk memastikan aplikasi sistem yang dibangun dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Selama proses ini, kami memastikan sistem telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara No 19 Tahun 2009 dan memenuhi standar kendali mutu yang ditetapkan.

Namun, penelitian ini masih terbatas dan belum terkait keamanan data dan keterbatasan sumber daya teknis. Oleh karena itu, rekomendasi kami adalah untuk terus melakukan pemantauan dan perbaikan dalam jangka panjang, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait guna meningkatkan keberlanjutan dan keberhasilan aplikasi sistem ini.

Keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa model pengemba Negara No 19 Tahun 2009 dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan aplikasi sistem yang terintegrasi dan terukur, pemerintahan dapat bergerak menuju arah yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ngan aplikasi sistem berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur

Daftar Kepustakaan

Furqani, A., Sosial, R. R.-G. J. I., & 2021, undefined. (n.d.). Kesiapan Penggunaan Teknologi Informasi Pada Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sumenep). *Jayapanguspress.Penerbit.Org*. Retrieved August 14, 2023, from <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1256>

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, Pub. L. No. 3 (2003).

Katalogis, R. B.-. (n.d.). Analisis Pengaruh Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Tojo Una-una. *Jurnal.Untad.Ac.Id*. Retrieved August 14, 2023, from <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6909>

Majid, J. (2021). KONTRIBUSI TEORI CONTIGENCY: UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI E-GOVERNMENT DI INDONESIA. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 186. <https://doi.org/10.24252/assets.v11i2.23810>

Maurer, F., & Martel, S. (2002). Extreme programming. Rapid development for Web-based applications. *IEEE Internet Computing*, 6(1), 86–90. <https://doi.org/10.1109/4236.989006>

Ridwan, I., (Jujur, I. S.-J. P. K. J., & 2021, undefined. (n.d.). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal.Untirta.Ac.Id*, 7. Retrieved August 14, 2023, from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/view/11611>

Siswidiyanto, S., Munif, A., Wijayanti, D., & Haryadi, E. (2020). Sistem Informasi Penyewaan Rumah Kontrakan Berbasis Web Dengan Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(1), 18–25. <https://doi.org/10.35969/interkom.v15i1.64>

Supriyanto, A. (2007). Arsitektur dan Teknik Desain Informasi pada Web. *DINAMIK, Jurnal Teknologi Informasi*, 12(1).

Syairozi, M. I. 'Pambudy, A. P. 'Yaskun, M. (2021). ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*.

Yusril, A. N., Larasati, I., & Al Zukri, P. (2021). Systematic Literature Review Analisis Metode Agile dalam Pengembangan Aplikasi Mobile. *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi* , 10(2), 369–380. <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>